

# **PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN BADUNG**

**Rosy Puspita Sari  
I Gusti Bagus Indrajaya**

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Kabupaten Badung merupakan Kabupaten di Provinsi Bali yang memperoleh predikat sebagai daerah otonom percontohan sejak tahun 2002 terkait kemandirian keuangan daerah. Harapan dari pengelolaan keuangan daerah ialah dapat dirasakan manfaatnya bagi semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah dan yang mengedepankan kepentingan publik, agar kesejahteraan masyarakat dapat tercipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara serempak dan parsial dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten Badung Tahun 2001-2012. Desain analisis yang dipakai ialah dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menyatakan dana perimbangan dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Badung Tahun 2001-2012, baik secara serempak maupun parsial.

*Kata kunci: dana perimbangan, pendapatan asli daerah, belanja daerah*

## **ABSTRACT**

*Badung Regency is a regency in the province of Bali which a designation as an autonomous region since 2002 related to pilot local financial independence. Hope is the area of financial management can be perceived benefit to all parties, both public and promote the interests of the government and the public, so that the public welfare can be created. This study aims to determine the effect of simultaneous and partially fund balance and revenue to the local shopping area of Badung Regency Year 2001-2012. Design analysis is used is by using multiple linear regression. The results stated fund balance and local revenues significantly influence the shopping area of Badung Regency Year 2001-2012, either simultaneously or partially.*

*Keywords: balance funds, local revenues, local shopping*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ialah suatu alat kebijakan terbaik untuk pemerintah daerah sebagai usaha mengembangkan kapasitas serta efektivitasnya. Sebagai usaha pemberdayaan pemerintah daerah, sudut pandang utama transisi yang dikehendaki pada manajemen keuangan dan anggaran daerah ialah pengelolaan keuangan daerah yang wajib mengedepankan kebutuhan orang banyak. Kondisi ini bukan hanya terlihat dari banyaknya pembagian porsi anggaran bagi kebutuhan masyarakat, namun terlihat pula dari tingginya keterlibatan publik pada rancangan, penerapan, serta pengendalian keuangan regional (Mardiasmo, 2002).

Afrizawati (2012) menjelaskan belanja daerah ialah pengeluaran regional yang dikatakan menjadi pengurang angka kekayaan neto, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang meliputi urusan wajib, pilihan, serta urusan yang penyelesaiannya dalam aspek tertentu yang bisa dijalankan bersama-sama antara pemerintah sentral dengan pemerintah regional ataupun antara pemerintah regional dengan pemerintah regional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja urusan wajib diutamakan untuk

menjamin serta menaikkan taraf hidup rakyat sebagai usaha memenuhi kewajiban daerah yang direalisasikan melalui peningkatan pelayanan dasar. Menurut Ping dan Bai (2005) pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menyediakan barang publik yang mendasar seperti: pendidikan, kesehatan dan perawatan medis, sistem jaminan sosial, pembangunan infrastruktur dan dukungan pertanian.

Peranan dari pengalokasian belanja daerah ialah tidak terlepas dari adanya asas desentralisasi yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1999. Menurut Setiawan (2010), belanja pemerintah yang oleh pemerintah daerah disampaikan dalam APBD merupakan aktivitas rutin pengeluaran kas daerah dalam hal mendanai aktivitas-aktivitas operasional. Pengeluaran belanja daerah yang semakin meningkat membutuhkan banyak dana untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah. Terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah merupakan pengalokasian anggaran yang patut dilaksanakan dengan efektif dan ekonomis, belanja daerah mampu dijadikan sebagai patokan keberhasilan pengimplementasian wewenang regional. Apalagi dalam masa pelaksanaan desentralisasi, pemerintah diminta mengendalikan keuangan daerah dengan baik dan efektif.

Menurut Mahmudi (2009:18) peningkatan kemandirian daerah sangat erat hubungannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerahnya (PAD). Walaupun dizaman otonomi daerah saat ini, hanya sedikit pemerintah daerah yang telah mengalami peningkatan kemandirian keuangan daerah secara signifikan. Darise (2009:48) mengartikan pendapatan asli daerah ialah penerimaan yang didapat daerah dari pemungutan atas dasar tata tertib daerah yang berdasarkan pada susunan perundang-undangan. Desentralisasi juga membawa perubahan pemikiran mengenai perimbangan keuangan daerah dan pusat, dengan mengubah prosedur penyaluran dana antara sentral dengan regional. Diterapkan pula konsep baru dalam sistem keuangan daerah yaitu dana perimbangan (Chalid, 2005:13). Dana perimbangan ialah anggaran yang berasal pada penerimaan APBN yang disalurkan untuk daerah sebagai upaya membiayai keperluan daerah dalam rangka penerapan desentralisasi (Taryono, 2013).

Belanja daerah Kabupaten Badung semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun, porsi belanja tidak langsungnya lebih tinggi daripada belanja langsungnya. Secara keseluruhan perbandingan belanja tidak langsung dengan jumlah belanja daerah Kabupaten Badung sebanyak 63 persen, sedangkan perbandingan belanja langsung dengan jumlah belanja daerah Kabupaten Badung hanya sebanyak 37 persen. Proporsi belanja langsung yang lebih kecil dibandingkan dengan belanja tidak langsung ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran sebagian besar masih digunakan untuk kewajiban-kewajiban yang bersifat mengikat.

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk melihat apakah dana perimbangan dan pendapatan asli daerah secara serempak dan parsial berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten Badung Tahun 2001 - 2012.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Dana Perimbangan**

Dana perimbangan ialah modal yang berasal dari perolehan APBN yang diperuntukkan bagi daerah dalam upaya membiayai kepentingan daerah sebagai bentuk pengimplementasian asas desentralisasi. Dana perimbangan terbagi menjadi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus (Aryanto, 2011). Otonomi daerah sampai saat ini masih menyumbangkan beragam persoalan. Keadaan geografis dan perbedaan potensi daerah yang menciptakan disparitas kemampuan keuangan untuk memenuhi kebutuhannya,

atau yang sering dikatakan sebagai celah fiskal, UU No. 33/2004 (dalam Try Indarningrum, 2011).

Dana Perimbangan bertindak sangat vital dalam mempengaruhi perekonomian regional (Kuncoro, 2004). Perimbangan finansial antara pemerintah pusat dengan pemerintah regional ialah suatu metode pengalokasian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien, dengan mempertimbangkan kemampuan, keadaan, dan keperluan daerah, UU No. 33/2004 (dalam Try Indarningrum, 2011).

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah yakni penerimaan yang dihasilkan daerah melalui pemungutan yang berdasarkan pada tata tertib daerah yang berlandaskan pada tatanan perundang-undangan. PAD termasuk sumber pendapatan yang dihasilkan sendiri oleh daerah yang harus selalu dikembangkan supaya bisa membiayai beberapa tanggung jawab belanja yang dibutuhkan bagi pengelolaan pemerintahan serta aktivitas ekspansi yang setiap tahunnya bertambah, sehingga kedaulatan otonomi daerah yang luas, nyata, serta bertanggung jawab sanggup dijalankan. PAD mencakup pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Darise, 2009:48).

Kinerja keuangan suatu daerah bisa dinilai melalui tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh daerah. Bila dilihat hubungannya dari kontribusi otonomi daerah bagi setiap daerah, PAD sering dianggap menjadi salah satu penunjuk ataupun tolak ukur dalam menilai keterikatan daerah terhadap pusat. Pada dasarnya, makin banyak kontribusi PAD terhadap APBD, ini menandakan makin kecilnya keterikatan regional terhadap sentral sebagai efek implementasi otonomi daerah atas asas secara nyata serta bertanggung jawab (Rinaldi, 2012).

### **Belanja Daerah**

Menurut Sasana (2011) penghasilan daerah yang diterima melalui pendapatan asli daerah ataupun dana perimbangan pastinya diperuntukkan untuk menanggung beban pengeluaran regional. Ollukayode (dalam Inuwa, 2012) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah merupakan salah satu instrumen strategis dalam perekonomian.

Klasifikasi belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Menurut Sasana (2011), belanja langsung yakni belanja yang dikeluarkan berhubungan langsung terhadap pengoperasian program ataupun kegiatan, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja tidak langsung yakni belanja yang dikeluarkan tidak berhubungan langsung terhadap pengoperasian program ataupun kegiatan, dimana belanja tidak langsung digolongkan menjadi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan pada Kabupaten Badung. Apabila dilihat dari keadaan fisik daerahnya. Kabupaten Badung mempunyai kemampuan dan kesempatan besar dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya, sehingga mampu memenuhi belanja daerahnya. Objek penelitian ini adalah Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2001-2012.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data kuantitatif pada studi ini meliputi informasi statistik dalam bentuk tabel yang diterima dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung serta Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan. Data kualitatif dalam studi ini yakni gambaran umum perihal kondisi dana perimbangan, pendapatan asli daerah, serta belanja daerah Kabupaten Badung Tahun 2001 - 2012.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis pada kajian ini dijalankan melalui penggunaan statistik melalui model regresi linear berganda. Kajian regresi ialah riset dependensi faktor terikat pada satu atau lebih faktor lain, yaitu variabel bebas (Suyana Utama, 2009). Teknik analisis dengan menggunakan regresi linear berganda ini, dimaksudkan untuk menguji apakah dana perimbangan dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten Badung Tahun 2001 - 2012. Model linier berganda, dapat dinyatakan seperti berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \mu \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

- Y = Belanja Daerah
- X<sub>1</sub> = Dana Perimbangan
- X<sub>2</sub> = Pendapatan Asli Daerah
- α = Intersep
- μ = Tingkat kesalahan (gangguan) stokastik
- β<sub>1</sub>β<sub>2</sub> = koefisien regresi untuk masing-masing variabel

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Badung merupakan kabupaten/kota yang terletak pada Provinsi Bali yang terbagi menjadi 6 kecamatan, keenam kecamatan tersebut adalah Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara, Petang, Mengwi, dan Abiansemal. Kabupaten Badung memiliki garis wilayah yaitu belahan utara kawasan ini yaitu area pegunungan yang berbatasan dengan kabupaten Buleleng, sedangkan di belahan selatan yakni dataran rendah dengan pantai berpasir putih serta berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Belahan tengah ialah area persawahan dengan panorama yang indah serta berbatasan dengan Kabupaten Gianyar serta Kota Denpasar di bagian Timur, sedangkan bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Tabanan. Dilihat dari pengelompokannya, Kabupaten Badung terdiri dari 26 daerah perkotaan dan 36 daerah pedesaan, (BPS Kabupaten Badung, 2013).

### Analisis Regresi Linear Berganda

Kajian ini dipakai untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, variabel independen dalam kajian ini yaitu dana perimbangan dan pendapatan asli daerah. Variabel terikat dalam kajian ini adalah belanja daerah. Hasil pengolahan data yang diperoleh yaitu:

Coefficients <sup>a</sup>					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-45335.6	58031.884		.455
	Dana Perimbangan	1.212	.231	.234	.001
	PAD	.938	.051	.822	.000

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data Diolah

Bersumber pada data diatas diperoleh persamaan regresi:

$$\hat{Y} = -45335,6 + 1,212 X_1 + 0,938 X_2 \dots \dots \dots (2)$$

### Uji Koefisien Regresi Secara Serempak

Signifikansi koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara serempak dapat diketahui melalui Uji F, Nata Wirawan (2002: 304-307). Bersumber pada hasil kajian regresi linear berganda yang menggunakan aplikasi SPSS, diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0,99 yang berarti bahwa 99 persen variasi belanja daerah Kabupaten Badung dipengaruhi oleh variasi dana perimbangan dan pendapatan asli daerah, sedangkan sisanya sebanyak 1 persen dipengaruhi oleh faktor lain diluar model. Serta diperoleh angka F hitung sebesar 454,381. Oleh karena F hitung model regresi sebesar 454,381 yang berarti lebih besar dari F tabel = 4,26 dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan dana perimbangan dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh secara serempak dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Badung Tahun 2001-2012.

### Uji Koefisien Regresi Secara Parsial

Signifikansi koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dapat diketahui melalui Uji t, Nata Wirawan (2002: 305-306).

- 1) Pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah Kabupaten Badung Tahun 2001 – 2012

Berdasarkan hasil perhitungan dengan SPSS diketahui bahwa dana perimbangan ( $X_1$ ) memiliki nilai t hitung sebesar 5,240 dan nilai t tabel = 1,833 yang berarti nilai t tabel lebih kecil dari nilai t hitung. Selain itu taraf signifikansi variabel ini lebih kecil daripada taraf signifikansi yang digunakan, yakni  $0,001 < 0,05$ , sehingga  $H_1$  diterima. Nilai-nilai tersebut menjelaskan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah Kabupaten Badung Tahun 2001 - 2012.

Hasil kajian ini sejalan dengan hasil kajian yang dijalankan Sasana (2011), dimana dana perimbangan mempunyai pengaruh positif dengan belanja daerah, dan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Jawa Barat. Rahmawati (2010) juga melakukan penelitian mengenai dana perimbangan, namun dalam penelitiannya variabel yang digunakan hanya dikhususkan pada Dana Alokasi Umum (DAU), diperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Kajian ini juga searah dengan penelitian yang dilaksanakan Afrizawati (2012), Setiawan (2010), Indraningrum (2011), dan Sulistyowati (2011).

- 2) Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten Badung Tahun 2001 – 2012

Berdasarkan hasil perhitungan dengan SPSS, diperoleh nilai t hitung pendapatan asli daerah ( $X_2$ ) sebesar 18,361 dan nilai t tabel = 1,833 yang berarti nilai t tabel tersebut lebih kecil dari nilai t hitung. Selain itu, taraf signifikansi variabel ini lebih kecil daripada taraf signifikansi yang digunakan, yaitu  $0,000 < 0,05$  sehingga  $H_1$  diterima. Nilai-nilai tersebut menjelaskan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah Kabupaten Badung Tahun 2001 - 2012.

Hasil kajian ini searah dengan hasil kajian yang dijalankan oleh Rahmawati (2010) dan Handayani (2012) yang menemukan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Penelitian yang dilaksanakan Setiawan (2010) juga mendapatkan hasil yang sama, pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Penelitian ini juga searah dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Afrizawati (2012) serta Rukmana (2013).

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui residual dari teknik regresi yang dilakukan terdistribusi normal atau tidak. Teknik regresi yang baik mempunyai pembagian residual yang normal atau mendekati normal. Penelitian ini memakai uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Z (I-Sampel K-S)*. Berdasarkan hasil olah data telah mengindikasikan bahwa residual model terdistribusi secara normal. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Asymp Sig (2-tailed) = 0,921* yang lebih besar dari 0,05.

#### Uji Autokolerasi

Uji autokolerasi bertujuan untuk menemukan adanya pengaruh data dari observasi sebelumnya. Dalam penelitian ini pengujian yang digunakan untuk menemukan ada atau tidaknya gejala autokolerasi ialah dengan menggunakan Uji Run. Pemeriksaan autokolerasi dengan menggunakan Uji Run, diharapkan residual berdistribusi secara acak atau tidak terjadi serial korelasi. Apabila distribusinya tidak acak atau terjadi serial korelasi menandakan adanya gejala autokolerasi. Oleh karena hasil Uji Run tidak signifikan atau dengan *Asimp. Signifikansi = 0,762* dimana lebih besar dari 0,05, maka diputuskan bahwa tidak terjadi gejala autokolerasi dalam model yang dibuat.

#### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengecek dalam model regresi didapati ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik sebaiknya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Model regresi yang baik ialah terbebas dari gejala multikolinear. Penemuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar semua variabel bebas dapat diamati dari tingkat *tolerance* dan tingkat *Variance Inflation Factor (VIF)*. Apabila tingkat *tolerance* lebih dari 10 persen atau *VIF* kurang dari 10, maka disebutkan tidak ada multikolinearitas. Berdasarkan hasil olahan data memperlihatkan bahwa Tolerance dari dana perimbangan ( $X_1$ ) dan pendapatan asli daerah ( $X_2$ ) masing-masing sebesar 0,544 diatas 0,10 dan *VIF* masing-masing sebesar 1,838 dibawah 10. Ini berarti tidak terjadi multikolinearitas antara dana perimbangan ( $X_1$ ) dan pendapatan asli daerah ( $X_2$ ).

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk memeriksa dalam model regresi terjalin ketidaksesuaian *variance* dari residual satu observasi ke observasi yang lain atau tidak. Hasil olah data dengan Uji *Glejser* menyatakan bahwa pengaruh variabel bebas dana perimbangan ( $X_1$ ) dan PAD ( $X_2$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap absolute residual (ABSRES) dari model regresi yang digunakan. Dimana tingkat signifikansi dana perimbangan sebesar 0,97 dan tingkat signifikansi PAD sebesar 0,351. Jadi dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model yang dibuat.

### PENUTUP

Bersumber dari hasil pemaparan yang telah diuraikan, maka ditarik kesimpulan bahwa dana perimbangan dan pendapatan asli daerah secara serempak dan parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Badung Tahun 2001 - 2012. Rekomendasi yang bisa diberikan pada penelitian ini yaitu belanja daerah Kabupaten Badung sebaiknya lebih diarahkan untuk belanja langsung. Sebab apabila diamati dari aspek kegunaannya, alokasi anggaran ke pos belanja langsung lebih memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Sebab alokasi belanja langsung digunakan untuk kegiatan pembangunan yang mengutamakan kepentingan publik.

## REFERENSI

- Afrizawati. 2012. Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*, 2(1), h: 21-30.
- Anonim. 2014. *Badung Gelontor Desa Dana Perimbangan dan Penyisihan Pajak 187 M Lebih, Perbekel di Badung Sumringah, Desa Kelola Dana Capai Rp. 3,5-Rp. 5,3 M.* (<http://www.badungkab.go.id>). Diakses 23 Maret 2014.
- Aryanto, Rudi. 2011. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah*, 3(2), h: 1-13.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Badung Dalam Angka*. Kabupaten Badung.
- Chalid, Pheni. 2005. *Keuangan Daerah Investasi, dan Desentralisasi Tantangan dan Hambatan*. Jakarta: Kemitraan.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Handayani, Dwi dan Elva Nuraina. 2012. Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 1(1), h: 1-12.
- Indraningrum, Try. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Langsung (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi* (dipublikasikan). Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Inuwa, Nasiru. 2012. Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria : Cointegration Analysis. *Academic Research International*. 2(3), pp: 718-723.
- Kuncoro, Haryo. 2004. Causality Between Total Government Expenditure, Total Tax Revenue, and Regional Income in the Case Of Municipalities'/ Regency' Local Government in Indonesia. *Journal*, pp: 1-21.
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Nata Wirawan. 2002. *Cara Mudah Memahami Statistik 2 (Statistik Inferensia) Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Denpasar: Keraras Emas.
- Ping, Xin-Qiao and Jie Bai. 2005. Fiscal Decentralization Local Public Good Provision in China. *Economic Research*, pp: 1-27.
- Rahmawati, Nur Indah. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Skripsi Sarjana* (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Rinaldi, Udin. 2012. Kemandirian Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal EKSOS*, 8(2), h: 105-113.
- Sasana, Hadi. 2011. Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 18(1), h: 46–58.
- Setiawan, Anjar. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi* (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

- Sulistyowati, Diah. 2011. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah. *Skripsi Sarjana* (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Suyana Utama, Made. 2009. *Buku Ajar Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar: Sastra Utama.
- Taryono. 2013. Analisis Struktur APBD Kabupaten Kampar tahun 2007-2012. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 8, h: 123-140.